

**KETERWAKILAN POLITIK KAUM PEREMPUAN PADA PEMILU  
LEGISLATIF PERIODE 2014-2019  
DI KOTA PONTIANAK**

**Oleh:**

**David Heriyanto Simamora**  
NIM. E.02110032

Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik,  
Universitas Tanjungpura Pontianak,  
email: [dheriyanto25@yahoo.com](mailto:dheriyanto25@yahoo.com)

**ABSTRAK**

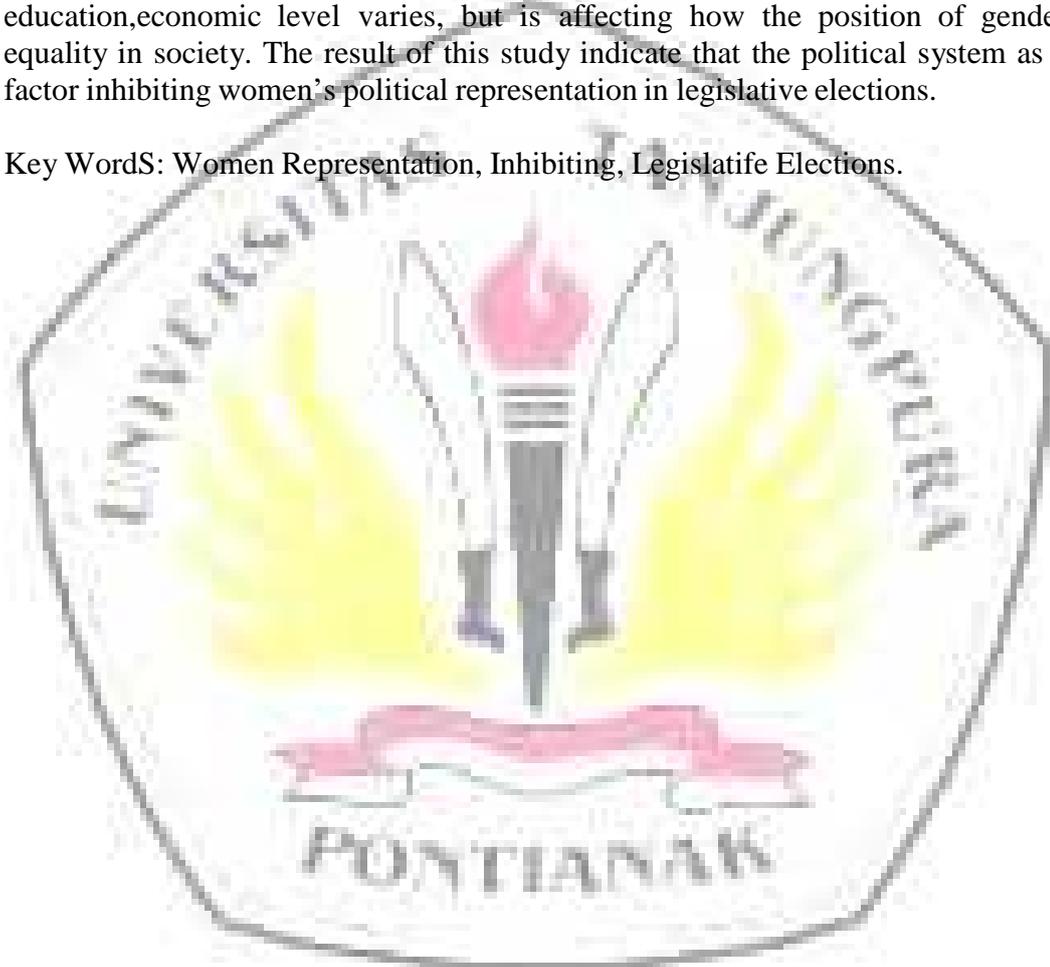
Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menjelaskan hambatan terhadap Keterwakilan Perempuan pada Pemilu Legislatif di Kota Pontianak Periode 2014-2019. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, walaupun secara formal keanggotaan legislatif perempuan masih dibawah kuota 30% yang harus dipenuhi, akan tetapi tetap menunjukkan adanya keterwakilan politik (*political representative*) yang baik. Serta budaya patriarki walaupun sulit diubah namun sedikit demi sedikit telah mengalami pergeseran nilai mengenai kedudukan dan peran perempuan. Walaupun tidak berlaku umum bagi seluruh elemen perempuan yang memiliki tingkat pendidikan, tingkat ekonomi yang berbeda-beda, akan tetapi cukup mempengaruhi bagaimana posisi kesetaraan gender yang berlaku dalam masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor sistem politik sebagai penghambat keterwakilan politik perempuan pada pemilihan umum legislatif.

Kata-kata Kunci: Keterwakilan Perempuan, Hambatan, Pemilu Legislatif.

## ABSTRACT

The purpose of this study was to describe barriers to the representation of women in legislative elections in the city of Pontianak period 2014-2019. The method used in this research is descriptive qualitative method, although the formal membership of female legislators still under quota 30% that must be met, but still showed good political representation. And a culture of patriarchy although difficult to change but little by little has undergone a shift in values regarding the position and role of women. Although it is not generally applicable to all elements of the women who have high levels of education, economic level varies, but is affecting how the position of gender equality in society. The result of this study indicate that the political system as a factor inhibiting women's political representation in legislative elections.

Key WordS: Women Representation, Inhibiting, Legislatife Elections.



## A. Pendahuluan

Wacana keterlibatan perempuan dalam dunia politik dengan memberikan kuota 30%, masih menjadi wacana kontroversi. Banyak kalangan perempuan sendiri menolak dengan alasan membatasi langkah perempuan, ditinjau dengan hitungan statistik berdasarkan jumlah masih dinilai tidak adil. Sebagian kalangan perempuan yang lain menyambut wacana tersebut dengan langkah maju untuk member ruang gerak bagi perekrutan dalam dunia politik.

Banyak kalangan perempuan yang tidak siap dan mendukung ketika sesama perempuan maju bersaing dalam sebuah ranah politik. Ketiadaan dukungan dari sebagian perempuan tentu didasari stigma dimasyarakat yang menilai perempuan cukup jadi makmum saja. Sehingga kesempatan tersebut kandas dan dimainkan oleh laki-laki kembali. Pertarungan di wilayah politik memang penuh intrik antara siapa mempengaruhi siapa. Persoalan pengaruh inilah yang harus digalang dari solidaritas kaum perempuan untuk memberi kepercayaan kepada para perempuan yang masih berkualitas di bidangnya.

Pembelaan dari sesama kaum perempuan perlu didukung jika ingin menyamakan dominasinya di publik. Pada tanggal 9 April 2014 dilakukan pemilihan umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang diselenggarakan secara serentak pada untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota se-Indonesia periode 2014-2019). Pemilihan umum anggota DPRD di Kota Pontianak dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka, dan diikuti oleh 12 partai politik. Pemilu Legislatif 2014 ini merupakan ajang untuk merekrut calon legislatif (caleg) yang diusung oleh berbagai partai untuk duduk sebagai anggota DPR, DPRD untuk masa bakti 2014-2019. Maka itu partai politik berperan sangat penting untuk melakukan rekrutmen terhadap orang-orang yang berkualitas untuk diusung menjadi calegnya, karena kualitas caleg akan berpengaruh kepada kualitas parlemen.

Keterlibatan perempuan dalam politik formal di Indonesia mulai memperoleh ruang sejak dikeluarkannya Undang-Undang Pemilu No. 12 Tahun 2003, yang menyebutkan pentingnya aksi afirmasi bagi partisipasi politik perempuan dengan menetapkan jumlah 30% dari seluruh calon partai politik pada parlemen di tingkat nasional maupun lokal. Aksi afirmasi seringkali didefinisikan sebagai upaya strategis untuk mempromosikan kesamaan dan kesempatan bagi kelompok tertentu dalam masyarakat seperti perempuan atau kelompok minoritas yang kurang terwakili dalam proses pengambilan keputusan.

Namun kenyataannya di DPRD Kota Pontianak Periode 2014-2019 kuota 30% yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang masih belum terpenuhi. Tentu dengan kekurangan kuota tersebut dapat mempengaruhi kebijakan dan kepentingan bagi perempuan di Kota Pontianak. Maka dari itu penulis ingin meneliti tentang faktor penghambat keterwakilan politik perempuan di parlemen yang dalam hal ini adalah DPRD khususnya di Kota Pontianak.

## B. Tinjauan Pustaka

### 1. Bentuk Perwakilan Politik

Definisi perwakilan atau representasi (*representation*) sangat bervariasi. Beberapa diantaranya adalah seperti yang dikemukakan Haris (2008) yang mendefinisikan representasi sebagai hubungan antara dua orang, wakil dengan pihak yang mewakilinya (konstituen), dimana wakil memegang otoritas untuk melaksanakan beberapa aksi yang mendapat persetujuan dari konstituennya.

Setidaknya ada lima konsep dasar perwakilan yang umum yang terjadi menurut Firnas, dkk, (2007). Kelima konsep dasar perwakilan tersebut yaitu :

- (i) *Delegated Representation*, yaitu seorang wakil diartikan sebagai juru bicara atas nama kelompok yang diwakilinya. Dengan demikian, seorang wakil tidak boleh bertindak di luar kuasa yang memberi mandat.
- (ii) *Microcosmic Representation*, konsep ini menunjukkan bahwa adanya kesamaan sifat-sifat antara mereka yang diwakili dengan diri sang wakil. Karenanya

kebutuhan ataupun tuntutan wakil adalah juga kebutuhan mereka-mereka yang diwakili. Dalam konsep ini masalah kuasa dan hal-hal yang harus dilakukan tidak pernah menjadi persoalan krusial antara wakil dan yang diwakili oleh karena kesamaan sifat yang dimiliki.

(iii) *Symbolic Representation*. Dalam *symbolic representation* tidak dipersoalkan juga mengenai masalah kuasa atau hal-hal yang harus dilakukan. Konsep ini hanya menunjukkan bahwa wakil melambangkan identitas atau kualitas golongan/kelas orang-orang tertentu yang diwakilinya, dan merupakan bentuk perwakilan yang hendak memperlihatkan bahwa mereka-mereka yang mewakili kelompok tertentu melambangkan identitas atau kualitas kelas atau golongan yang tengah diwakilinya.

(iv) *Elective Representation*, konsep ini dianggap *belum* menggambarkan kuasa atau hal-hal yang harus dilakukan wakil mereka, sehingga belum menjelaskan tentang hubungan

antara wakil dengan yang memilihnya.

(v) *Party Representation*, individu-individu dalam lembaga perwakilan merupakan wakil dari partai politik (atau konstituen) yang diwakilinya. Semakin meningkatnya organisasi dan disiplin partai mendorong lahirnya *party bosses* dan *party caucuses*. Para wakil dalam lembaga perwakilan menjadi wakil dari organisasi /partai politik yang bersangkutan.

(vi) Faktor Penghambat Keterwakilan Politik Perempuan di Dunia Politik Rendahnya keterwakilan perempuan di Lembaga Legislatif mengakibatkan minimnya peran dan partisipasi perempuan dalam setiap pengambilan keputusan. Oleh karena itu, sangatlah wajar ketika kebijakan-kebijakan yang dibuat sangat maskulin dan kurang berperspektif gender. Dalam hal ini perempuan tidak banyak terlibat dalam proses pembuatan keputusan.

Realitas politik yang menunjukkan masih rendahnya keterwakilan perempuan di parlemen yaitu masih berada di bawah proporsi

(*under-represented*) mengindikasikan bahwa keterwakilan perempuan dalam kehidupan politik kurang diperhatikan. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Sri Lestari Ayu (2004:69) bahwa terdapat empat kendala yang menghambat perempuan untuk terlibat di bidang politik antara lain dapat disimpulkan sebagai berikut:Kendala pertama adalah kendala sistem politik, meliputi: (1) model maskulin yang mendominasi warna politik di mana laki-laki lebih menentukan standar untuk evaluasi dan memformulasi aturan permainan politik; (2) lemahnya dukungan partai dan lemahnya rekrutmen kader politik perempuan yang masih memberlakukan standar ganda bagi perempuan di mana persyaratan pencalonan masih diwarnai karakteristik laki-laki; (3) lemahnya kerjasama dengan organisasi perempuan; (4) ketiadaan sistem pelatihan dan pendidikan yang memadai bagi kaum atau kader perempuan; dan (5) sistem pemilihan (distrik atau proporsional) yang akan menguntungkan kaum perempuan. Kendala kedua adalah menyangkut realitas sosial budaya yakni

anggapan adanya dominasi budaya patriakat yang menempatkan laki-laki sebagai pusat kekuasaan baik di wilayah domestik maupun publik masih kuat, sehingga menyebabkan adanya stereotip terhadap perempuan yang ingin masuk atau berkarir di dunia politik. Kendala ketiga adalah menyangkut hambatan psikologis, yakni ketakutan perempuan untuk berkuasa atau meraih kekuasaan. Dan, kendala keempat adalah hambatan sosial ekonomi yakni kemiskinan dan pengangguran, yang memadai, buta huruf dan rendahnya akses pendidikan, termasuk pendidikan politik, serta beban ganda perempuan.

### **C. Jenis Penelitian**

Penentuan jenis penelitian yang akan digunakan adalah sesuai dengan masalah sifat dan tujuan penelitian. Jenis penelitian yang akan digunakan adalah kualitatif dalam bentuk deskriptif. Menurut Faisal (2012:12) bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang didalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisa,

dan menginterpretasikan kondisi-kondisi sekarang ini.

#### **D. Tempat dan Waktu Penelitian**

Tempat penelitian ini adalah di Kota Pontianak, khususnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pontianak. Dan penelitian ini berlangsung selama 3 bulan.

#### **E. Teknik Analisis Data**

##### **a. Pengumpulan Data**

Sebagai konsep dasar, langkah-langkah yang dilakukan dalam menganalisa data, pertama mengorganisasikan data, data yang terkumpul banyak sekali yang terdiri dari catatan lapangan, komentar peneliti, dokumen berupa laporan dan sebagainya. Sementara pekerjaan analisis data dalam hal ini adalah mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, dan memberikan kode dan mengkategorikannya.

##### **b. Reduksi data**

Reduksi data merupakan langkah meliputi proses manipulasi, integrasi dan transformasi serta kategorisasi data. Reduksi data akan sangat membantu dalam mengidentifikasi aspek penting dari

pertanyaan yang diajukan dalam penelitian untuk memfokuskan data yang terkumpul, sehingga akhirnya sampai pada kesimpulan. Proses reduksi data meliputi, membaca dengan hati-hati identifikasi tema-tema utama dari proses penelitian, tingkah laku dan sebagainya.

##### **c. Penyajian Data**

Setelah kegiatan reduksi dilakukan, kemudian data tersebut disajikan menjadi kumpulan informasi yang telah disusun, sehingga dari informasi tersebut dapat ditarik kesimpulan sementara yang akan diuji lebih lanjut untuk mendapatkan hasil yang diinginkan.

##### **d. Penarikan Kesimpulan**

Merupakan langkah akhir dari suatu analisis data yang berusaha mencari arti terhadap data yang disajikan dan berusaha menghubungkan data dengan gejala sosial lainnya.

#### **F. Pembahasan**

##### **1. Kendala Sistem Politik**

Adapun kendala-kendala sistem politik yang dialami oleh kaum perempuan adalah sebagai berikut: Tantangan pertama (1) adalah

dari sistem pemilu baru itu sendiri, yaitu dalam hal bilangan pembagi pemilih (BPP), yakni angka pendapatan suara di suatu wilayah dibagi kursi yang diperebutkan. . Selain itu ada alasan serupa yang diungkapkan oleh Ibu DN (Caleg Tidak Terpilih) bahwa

“Pertama, dengan sistem pemilu proporsional terbuka dalam pemilu 2014, perempuan bakal calon bukan hanya harus berjuang agar namanya masuk di dalam daftar jadi partainya, tetapi harus berada pada urutan pertama atau kedua dalam daftar calon. Kedua, nama calon yang mencapai angka Bilangan Pembagi Pemilih (BPP jumlah suara dibagi kursi yang diperebutkan) ditetapkan sebagai calon terpilih. Ketiga, daerah pemilihan. Semakin kecil kursi yang diperebutkan di suatu daerah pemilihan, semakin kecil perempuan akan terpilih. Sebaliknya, semakin besar daerah pemilihan, maka semakin besar peluang perempuan caleg untuk terpilih asalkan kandidat perempuan ini berada pada nomor urutan jadi”.

Kendala kedua (2) adalah kurangnya dukungan partai politik. Seperti diketahui bahwa perempuan memainkan peran penting dalam

kampanye dan memobilisasi dukungan di partai- partai politik dukungannya, tetapi mereka tidak memperoleh dukungan dari kegiatan yang mereka lakukan. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan informan Ibu IN (Caleg Tidak Terpilih) menyatakan

“Saat saya mengikuti Pemilu Legislatif kemarin, saya menempati nomor urut 4. Dalam proses penentuan nomor urut caleg, sangat kecil peluangnya bagi perempuan untuk mendapat nomor urut teratas. Banyak yang perlu dipertimbangkan oleh partai dalam penentuan nomor urut caleg. Seperti faktor pendidikan, dan eksistensi caleg di masyarakat”.

Kendala ketiga (3) Kurangnya Promosi. Dengan sistem baru pemilihan umum yang diterapkan, persaingan antar partai politik untuk memperoleh suara terbanyak menjadi sangat ketat, hal ini dikarenakan setiap partai politik berusaha memperoleh sebanyak mungkin kursi di legislatif, guna menempatkan kader-kadernya. Kurangnya promosi yang dilakukan oleh partai politik terhadap setiap caleg khususnya perempuan juga dialami Ibu SA (Caleg Tidak Terpilih)

“Selama saya mengikuti Pileg

2014 yang kemarin, Partai belum sepenuhnya mendukung kader-kadernya yang ikut dalam Pileg kemarin. Jadi, saya pribadi dituntut untuk mandiri dalam berkampanye di publik. Seharusnya partai mendukung saya agar pendapatan suara dari dapil saya dapat terpenuhi”.

Kendala keempat (4) Pengembangan Kapasitas Perempuan. Dalam masyarakat patriarki seperti di Indonesia, perempuan harus berhadapan dengan masalah kapasitasnya dalam hal dunia politik, sementara itu kapasitas laki-laki tidak pernah dipertanyakan.

Kendala kelima (5) Penominasian perempuan yang dilakukan oleh partai politik. Didalam tubuh sebagian partai politik masih terlihat kurangnya demokrasi, dimana sebagian partai politik tidak memiliki kriteria nominasi kandidat yang transparan, terukur dan terpercaya. Keputusan dalam proses nominasi dan penempatan dalam daftar dibuat hanya oleh beberapa elit partai, dan ini pun tidak dilakukan secara transparan.

#### 1. Kendala Sosial Budaya

Sumber dari permasalahan

keterwakilan perempuan terletak pada budaya patriarki, yaitu nilai-nilai yang hidup dimasyarakat yang memosisikan laki-laki sebagai *superior* dan perempuan sebagai *subordinate*. Budaya patriarki seperti ini tercermin dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, maupun bernegara, dan menjadi sumber pembenaran terhadap sistem distribusi kewenangan, sistem pengambilan keputusan, sistem pembagian kerja, sistem kepemilikan, dan sistem risorsi yang bias gender. Muara dari masalah kultural ini adalah kecenderungan terjadinya diskriminasi, dan marginalisasi terhadap perempuan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis terhadap Ibu SR (Caleg Terpilih) bahwa pada umumnya “Pertama, faktor maskulinitas lah yang paling berpengaruh selama mengikuti Pileg 2014. Dikarenakan bahwa saya harus berjuang melawan dominasi caleg pria yang sudah dikenal luas masyarakat khususnya Pontianak timur dan juga saya berjuang mendapatkan suara masyarakat terutama dari daerah pemilihan di daerah Pontianak Timur. Kedua, masih banyaknya caleg yang menggunakan cara cara “kotor” dengan menyewa jasa preman untuk menakuti

masyarakat agar memilih salah satu calon. Ketiga, bermodalkan pengalaman saya yang sudah pernah duduk di dewan sehingga saya masih lebih dikenal di masyarakat khususnya di Pontianak Timur”. Selanjutnya Ibu SR menambahkan bahwa selama beliau duduk di dewan selalu memperjuangkan aspirasi masyarakat baik dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan juga infrastruktur. Begitu juga yang diungkapkan oleh Ibu EL (Caleg Tidak Terpilih)

“Memang sangat sulit untuk mengimbangi popularitas caleg pria. Hal ini lah yang sangat berat saya rasakan ketika terjun ke dunia politik. Selain faktor pengalaman caleg pria yang lebih dominan di Pileg kemarin, saya baru pertama kali ikut dalam Pileg kemarin. Jadi dengan tidak terpilihnya saya, maka saya jadikan acuan sebagai pembelajaran untuk kedepannya bila ingin terlibat dalam pemilu legislatif mendatang”.

## 2. Kendala Psikologis

Kurangnya rasa kepercayaan diri adalah suatu penyebab utama atas kurang keterwakilan perempuan dalam ruang-ruang publik politik: parlemen,

yudikatif, pemerintahan, hingga partai-partai politik

Hal serupa juga diungkapkan oleh narasumber Ibu BN (Caleg Terpilih) yang penulis wawancarai, bahwa

“Psikologis merupakan faktor yang paling berat saya rasakan ketika turut serta dalam Pemilu Legislatif saat ini. Bagaimana keluarga saya terutama Suami, anak-anak saya serta Orang tua saya dapat mendukung saya. Dan juga bagaimana saya dapat membagi waktu dengan keluarga dan pekerjaan saya. Saya ingin membuktikan persepsi bahwa perempuan mampu untuk bersaing di dunia politik dan bukan sebagai pelengkap dalam kehidupan berumah tangga. Sejak kecil saya sudah akrab dengan dunia politik, dikarenakan Orang tua saya pernah menjabat di partai politik dan juga duduk di lembaga legislatif. Di sisi lain, saya juga mengetahui tentang politik dan juga partai memberikan Pendidikan politik bagi kader-kadernya yang turut ambil bagian dalam pemilu.”

Bahwa “Bagi saya yang paling berat ketika saya terjun langsung dalam dunia politik adalah faktor Psikologis. Karena saya harus mendapatkan restu

dari suaminya dan anak-anak saya. Sejauh ini, keluarga saya mengizinkan saya untuk terjun ke dunia politik. Tapi, di sinilah sebenarnya seorang perempuan diuji secara mental. Bagaimana dia mengurus rumah tangga dan terjun ke dunia politik”.

### 3. Kendala Sosial Ekonomi

Kondisi sosial ekonomi memainkan peran yang menentukan dalam rekrutmen anggota legislatif perempuan pada ruang publik baik dalam demokrasi yang baru berkembang maupun dalam demokrasi yang sudah mantap. Tidak perlu dikatakan lagi bahwa status sosial ekonomi perempuan dalam masyarakat mempunyai pengaruh langsung pada keterwakilan perempuan dalam lembaga-lembaga publik formal.

Berdasarkan wawancara penulis terhadap Ibu UH (Caleg Tidak Terpilih) berpendapat bahwa

“Yang paling berat saya rasakan dalam mengikuti Pemilu Legislatif kemarin adalah masalah ekonomi. Dikarenakan bahwa saya harus mendanai diri saya sendiri dan juga saat ini saya juga sebagai pimpinan partai politik yang

memerlukan biaya sebagai partai peserta Pemilu. Namun, banyaknya biaya yang saya keluarkan selama saya mengikuti Pileg kemarin, tidak didukung oleh kader-kader partai saya”. Sama halnya yang diungkapkan oleh Ibu AA (Caleg Terpilih) bahwa “Kurang mendukungnya sumber daya keuangan yang memadai serta akses yang terbatas terhadap sumber pendanaan yang dibutuhkan, Kurangnya sumber pendanaan terlihat dari kondisi ekonomi beberapa caleg termasuk saya, yang kurang mendukung. Selain itu kelemahan caleg perempuan dibandingkan caleg laki-laki adalah caleg perempuan kurang memiliki kemampuan dalam mencari sumber-sumber pendanaan untuk mendukung pencalonannya sebagai caleg. Faktor lainnya yang menjadi kelemahan caleg perempuan adalah sifat hemat yang dimilikinya, sehingga menjadi penghalang apabila harus berhadapan dengan kenyataan harus mengeluarkan biaya yang banyak”.

## G. Kesimpulan dan Saran

### 1. Kesimpulan

Dari keempat faktor penyebab terhambatnya keterwakilan politik perempuan seperti faktor sistem politik, sosial budaya, ekonomi, psikologis, penulis menyimpulkan bahwa faktor sistem politik lah yang paling berpengaruh terhadap keterwakilan perempuan dalam dunia politik di Kota Pontianak.

## 2. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka pada kesempatan ini penulis ingin memberikan beberapa saran antara lain adalah sebagai berikut:

### 1. Kendala Sistem Politik.

Perlu adanya evaluasi terhadap pelaksanaan sistem pemilihan umum yang dinilai dan dirasakan diskriminatif terhadap kaum perempuan sistem yang digunakan justru menjadi penghalang bagi perempuan untuk duduk di kursi Legislatif.

### 2. Kendala Sosial-Budaya

Budaya patriarki yang selama ini mengakar dalam sistem politik yang didominasi oleh kaum laki-laki perlu dihapus karena budaya patriarki memiliki dampak negatif yang besar bagi upaya perempuan untuk

mendapatkan hak dalam partisipasi politiknya.

### 3. Kendala Ekonomi

Dalam dunia politik sangat dipastikan membutuhkan sejumlah dana. Seharusnya setiap caleg perempuan yang turut serta dalam pemilu legislatif, sudah mempersiapkan budget yang akan dikeluarkan selama mengikuti pemilu tersebut.

### 4. Kendala Psikologis

Pemberdayaan perempuan di Kota Pontianak perlu ditingkatkan, terutama pendidikan politik perempuan. Untuk itu peran ormas-ormas perempuan perlu memanfaatkan sebagai wadah bagi kaum perempuan guna memperoleh pengetahuan yang banyak tentang politik. Penerapan pengarusutamaan gender dalam setiap kegiatan termasuk dalam kegiatan politik, dengan penerapan pengarusutamaan gender merupakan strategi utama untuk menjamin agar perempuan mendapatkan akses yang sama dalam partisipasi di bidang politik.

## H. Referensi Buku

### 1. Literatur Buku

Faisal, Sanapiah. 2012 *Format - Format Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Haris, Andi, 2008. *Di Balik Optimisme Perwakilan Politik*. Jakarta: Pancuran Alam.

Sri Lestari Rahayu, 2004. *Rintang-Rintang Pemberlakuan Kuota 30% bagi Perempuan*.

Surakarta: UNS Press.

### 2. Sumber Jurnal

Ardian Firmas, dkk. 2007. *Persepsi dan Partisipasi Politik Dalam Pemilu 2004*.

Dinamika (Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik), edisi Januari 2007”



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS TANJUNGPURA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
PENGELOLA JURNAL MAHASISWA

Jalan A. Yani Pontianak, Kotak Pos 78124

Homepage: <http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id>

Email: [jurnalmhs@fisip.untan.ac.id](mailto:jurnalmhs@fisip.untan.ac.id)

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH/PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : DAVID HERMANO SIMAMORA  
NIM / Periode lulus : E02110032 / 2014  
Fakultas/Jurusan : FISIPOL / IA  
E-mail address/HP : david.hermano75@yaho.com

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa (\*) pada Program Studi..... Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul \*\*):

KETERAWAKILAN POLITIK KARYA PEREMPUAN PADA DETILU  
LEGISLATIF PERIODE 2014-2019 DI KOTA PONTIANAK

berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain):

- secara *fulltext*  
 *content* artikel sesuai dengan standar penulisan jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demiikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.



Mengelola/disetujui  
Pengelola Jurnal 18 Nov. 2014  
NIP. 198911222002121002

Catatan:

\*tulis nama jurnal sesuai prodi masing-masing

Dibuat di : PONTIANAK  
Pada tanggal: 16 NOV 2014

DAVID HERMANO SIMAMORA  
nama terang dan tanda tangan mhs

setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author).